



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SEK.2-1019.KP.10.02 TAHUN 2022

TENTANG

KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM AHLI MUDA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat dan telah lulus Uji Kompetensi untuk dapat dinaikkan dalam jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Muda di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 53);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1366);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi;
10. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1103/M.SM.01.00/2022 tanggal 30 Mei 2022 hal Persetujuan Usulan Kebutuhan JF Penyuluh Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM AHLI MUDA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, dengan jabatan lama sebagaimana tersebut dalam lajur 4, dinaikkan dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini, dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2022

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

SUTRISNO
NIP. 196210151985031002

Tembusan:

1. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
5. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
8. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR : SEK.2-1019.KP.10.02 TAHUN 2022
TANGGAL : 27 Juni 2022

NO	NAMA / NIP	PANGKAT GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6
1.	PADMODIAN WIDININGTIYAS, S.H., M.H. NIP. 198304262006042001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten	221,38
2.	NASRUDDIN, S.H., M.H. NIP. 198312202007031002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan	217,42
3.	ANSHARULLAH, S.H.I. NIP. 198411132010121004	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh	214,68
4.	UTIN PUTRI NOVI LESTARI, S.E. NIP. 198511122010122001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat	212,76
5.	INDAH RAHAYU, S.H. NIP. 198711152010122001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Badan Pembinaan Hukum Nasional	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Badan Pembinaan Hukum Nasional	207,91
6.	ANGGIE PURNASARI CORRIE, S.H., M.H. NIP. 198703022006042003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan	206,91
7.	DICKY MOCHAMMAD FAISAL, S.H. NIP. 199107282015031003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Badan Pembinaan Hukum Nasional	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Badan Pembinaan Hukum Nasional	203,35
8.	SYAMSURIUL, S.Ag., M.Ag. NIP. 197701072010121002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat	201,99
					9. . .

1	2	3	4	5	6
9.	LIZA HARTATI, S.H. NIP. 198502052005012002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu	200,47
10.	WAHYU WARSITO, S.Kom., M.H. NIP. 198404112007031001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta	200,07
11.	HERMANTO, S.Pd. NIP. 198212262006041001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat	200,01



a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

SUTRISNO
NIP. 196210151985031002